



DISNAKER ADAPTIF
SIGAP atas perubahan



RENCANA KERJA

DISNAKER KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2023



G20
INDONESIA
2022

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2021– 2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat yang baik, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyusun Renja berdasarkan evaluasi terhadap hasil Renja pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan dijadikan dasar untuk penyusunan Renja pada tahun berikutnya. Secara garis besar Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ini berisikan informasi mengenai rencana kerja dan capaian kinerja untuk tahun 2021, serta Rencana Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2023. Renja tersebut memuat sasaran kerja yang ingin dicapai selama tahun 2023 yang mengacu Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan 2021-2026. Pengacuan tersebut agar selalu terpadu dan konsisten terhadap perencanaan dan penganggaran.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ini belum sepenuhnya sempurna. Namun, semoga hasil penyusunan ini dapat dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, Juli 2022
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Balikpapan



ANI MUFAIDAH

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL...	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah.....	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	32
3.3. Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	47
4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintahan Kota.....	47
BAB V PENUTUP	48
5.1. Catatan Penting.....	48
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	48
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan	1
Tabel 2.2	e.81 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	8
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Utama.....	16
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	20
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	32
Tabel 3.2	Identifikasi Tujuan, Sasaran, dan Indikator sasaran Renstra Perangkat daerah Terhadap Evaluasi tahun sebelumnya	33
Tabel 3.3	TC-33 Rumusan Rencana Programdan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	36

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dinas Ketenagakerjaan senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang, terutama Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya Dinas Ketenagakerjaan, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2014;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
- e. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap reformasi birokrasi 2020-2024;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

C. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

a. Maksud

- Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis;
- Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selama setahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan revidi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2021. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran 2021**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	6,230,320,328	5,791,223,939	439,096,389	93%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,579,550,000	4,421,352,703	158,197,297	97%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,579,550,000	4,421,352,703	158,197,297	97%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	264,150,000	221,629,960	42,520,040	84%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	31,200,000	31,200,000	-	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	232,950,000	190,429,960	42,520,040	82%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
administrasi Umum Perangkat daerah	903,905,076	788,609,418	115,295,658	87%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	2,895,000	2,895,000	-	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205,902,576	195,736,076	10,166,500	95%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	325,152,300	251,105,000	74,047,300	77%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38,601,500	38,369,550	231,950	99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,217,000	8,172,000	45,000	99%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323,136,700	292,331,792	30,804,908	90%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,107,752	127,104,114	61,003,638	68%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,950,000	2,950,000	-	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,080,000	4,358,126	23,721,874	16%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157,077,752	119,795,988	37,281,764	76%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294,607,500	232,527,744	62,079,756	79%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	205,007,500	153,452,744	51,554,756	75%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73,100,000	62,875,000	10,225,000	86%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,500,000	16,200,000	300,000	98%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	958,616,500	785,824,083	172,792,417	82%
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	908,835,000	780,424,083	128,410,917	86%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	908,835,000	780,424,083	128,410,917	86%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49,781,500	5,400,000	44,381,500	11%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49,781,500	5,400,000	44,381,500	11%
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	-	-	-	0%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	-	-	-	0%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	195,933,000	129,075,500	66,857,500	66%
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	97,988,000	75,090,500	22,897,500	77%
Pelayanan Antar Kerja	97,988,000	75,090,500	22,897,500	77%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	-	-	-	0%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	97,945,000	53,985,000	43,960,000	55%
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	59,945,000	51,129,000	8,816,000	85%
Job Fair / Bursa Kerja / Perluasan Kesempatan Kerja	38,000,000	2,856,000	35,144,000	8%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	226,209,200	164,614,955	61,594,245	73%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,000,000	14,338,000	6,662,000	68%
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	2,000,000	1,870,000	130,000	94%
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	6,000,000	5,610,000	390,000	94%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	13,000,000	6,858,000	6,142,000	53%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	205,209,200	150,276,955	54,932,245	73%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	92,609,500	65,208,455	27,401,045	70%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	22,350,000	14,833,500	7,516,500	66%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2,000,000	1,870,000	130,000	94%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	88,249,700	68,365,000	19,884,700	77%
Total	7,611,079,028	6,870,738,477	740,340,551	

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, besar anggaran (DPA) Dinas ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2021 sebesar Rp. 7.611.079.028 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.870.738.477 sehingga terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.740.340.511.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Disnaker Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 e.81
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2021
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
					5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang efektif, Transparan, dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	81.5	6,230,320,328	2.5	1,032,126,129	9.3	305,369,357	13	1,901,479,455	53.3	2,552,248,998	77.7	5,791,223,939	95%	93%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.47	4,579,550,000	20	980,887,649	20	117,014,622	23	1,849,777,345	20	1,473,673,087	83.5	4,421,352,703	100%	97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	26	4,579,550,000	6	980,887,649	2	117,014,622	12	1,849,777,345	6	1,473,673,087	26	4,421,352,703	100%	97%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	27	264,150,000	27	31,200,000	0	-	0	-	0	190,429,960	27	221,629,960	100%	84%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik dan Olah Raga	60	31,200,000	60	31,200,000	0	-	0	-	0	-	60	31,200,000	100%	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30	232,950,000	0	-	0	-	0	-	30	190,429,960	30	190,429,960	100%	82%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
	administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	9	903,905,076		-	3	112,529,800	2	27,345,600	4	648,734,018	9	788,609,418	100%	87%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Barang Untuk Keperluan Pencahayaan dan Hubungan Listrik	6	2,895,000	0	-	0	-	0	-	5	2,895,000	5	2,895,000	83%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung	17	205,902,576			5	5,179,000			12	190,557,076	17	195,736,076	100%	95%
		Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung	13										0	-	0%	0%
		Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang disediakan											0	-	0%	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan	75	325,152,300			25	24,805,500	25	24,465,600	25	201,833,900	75	251,105,000	100%	77%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat dengan Dinas dan Tamu	1300										0	-	0%	0%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12	38,601,500			4	10,435,100		-	8	27,934,450	12	38,369,550	100%	99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	8,217,000			1	720,000	1	2,880,000		4,572,000	2	8,172,000	100%	99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	89	323,136,700			45	71,390,200		-	44	220,941,592	89	292,331,792	100%	90%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	6	188,107,752	1	20,038,480	2	41,813,445	2	21,620,480		43,631,709	5	127,104,114	83%	68%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	3	2,950,000	0	-	2	1,500,000	1	1,450,000	0	-	3	2,950,000	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telepon, TV Kabel	6	28,080,000			2	933,225	1	132,000	2	3,292,901	5	4,358,126	83%	16%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non PNS	84	157,077,752	21	20,038,480	21	39,380,220	21	20,038,480	21	40,338,808	84	119,795,988	100%	76%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	3	294,607,500		-	1	34,011,490	1	2,736,030		195,780,224	2	232,527,744	67%	79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara dan Beroperasi Dengan Baik	13	205,007,500			2	14,756,490	1	2,736,030	10	135,960,224	13	153,452,744	100%	75%
		Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional											0	-	0%	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang terawat dan Terpelihara	6	73,100,000			2	15,205,000		-	4	47,670,000	6	62,875,000	100%	86%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tanaman Hias Dalam Pot Yang Dipergunakan Untuk Memperindah Interior Gedung	165	16,500,000			55	4,050,000		-	110	12,150,000	165	16,200,000	100%	98%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
Tersedianya Tenaga Kerja Yang Kompeten dan Produktif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan keterampilan /skill pencaker	84	958,616,500	15	-	22.00	16,394,260	19	13,979,023	25	755,450,800	81	785,824,083	96%	82%
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100	908,835,000	11	-	37.50	16,394,260	100	13,979,023	0	750,050,800	149	780,424,083	149%	86%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Gakin Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	40	908,835,000	0	-	8	16,394,260	8	13,979,023	16	750,050,800	32	780,424,083	80%	86%
			Jumlah Pencari Kerja Yang Difasilitasi Magang di Perusahaan		120		0		0		0		0		0%	0%
			Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja		130		0		0		0		0		0%	0%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	84	49,781,500		-		-		-	80	5,400,000	80	5,400,000	95%	11%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	5	49,781,500							5	5,400,000	5	5,400,000	100%	11%
	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerwirausahaan	0	-									0	-	0%	0%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	Jumlah Jenis Pengadaan Sarpras BLK	0	-									0	-	0%	0%	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Pasar Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	26	195,933,000	6.5	-	10.5	11,024,500	14	-	6.3	118,051,000	36.8	129,075,500	142%	66%
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	26	97,988,000		-	10.5	11,024,500		-	16.3	64,066,000	26.8	75,090,500	103%	77%
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	7000	97,988,000			1500	11,024,500		-	5500	64,066,000	7000	75,090,500	100%	77%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Siswa/Siswi SMK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	5	97,945,000		-		-		-	5	53,985,000	5	53,985,000	100%	55%
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	12	59,945,000				-		-	11	51,129,000	11	51,129,000	92%	85%
	Job Fair / Bursa Kerja / Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan	1	38,000,000							1	2,856,000	1	2,856,000	100%	8%
	Jumlah dokumen profil ketenagakerjaan kota Balikpapan													0%	0%	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan	50	226,209,200	15	-	30	8,381,500	18	-	7	156,233,455	69.5	164,614,955	139%	73%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Syarat Kerja	150	21,000,000		-		-		-	110	14,338,000	110	14,338,000	73%	68%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	70	2,000,000							100	1,870,000	100	1,870,000	143%	94%
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang memiliki Bukti Pendaftaran Perjanjian Kerjasama	150	6,000,000							600	5,610,000	600	5,610,000	400%	94%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	- Jumlah Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan - Jumlah Perusahaan yang Patuh pada ketentuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	- 12 - 30	13,000,000							100	6,858,000	100	6,858,000	0%	53%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Kondusif dalam Peta Kerawanan Hubungan Industrial	50	205,209,200		-	10	8,381,500		-	40	141,895,455	50	150,276,955	100%	73%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Rapat Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan	1	92,609,500							1	65,208,455	1	65,208,455	100%	70%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100	22,350,000	0	-	25	8,381,500	0	-	15	6,452,000	40	14,833,500	40%	66%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi, dan Konfederasi yang terverifikasi	50	2,000,000							50	1,870,000	50	1,870,000	100%	94%
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sidang Dewan Pengupahan Kota Balikpapan	1	88,249,700							1	68,365,000	1	68,365,000	100%	77%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan ketenagakerjaan bukan merupakan urusan wajib yang bersifat dasar, sehingga untuk pengukuran kinerja pelayanannya tidak mempergunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk pengukuran kinerja pelayanan mempergunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Rasio Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif.	1. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.	%	100	148.75	148.75
		2. Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan.	%	60	136.67	228
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	26	36.8	141.5
		2. Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan.	%	40	0	0
3.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).	%	50	69.5	139
Rata – Rata Capaian					94.6	131.45

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi OPD yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, serta telaah renstra kementerian dan lembaga, maka isu-isu strategis yang akan di respon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam perencanaan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan Pelatihan Kerja

Seiring dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dan menyongsong persaingan pasar bebas asia pasifik tahun 2030 (Free Trade Area of Asia Pasific-FTAAP), maka pengembangan sumber daya tenaga kerja yang terampil melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi merupakan isu ketenagakerjaan yang penting. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja antara lain :

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan kerja di daerah yang terakreditasi;
- b. Terbatasnya sumberdaya Pemerintah Kota, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, dan
- c. Terbatasnya lembaga sertifikasi profesi di daerah.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja di daerah pada tahun 2023 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- Pelatihan berbasis kompetensi :
 - Mekanik Alat Berat sebanyak 16 orang;
 - Welding / Las sebanyak 16 orang;
 - Mekanik Otomotif sebanyak 16 orang;
 - Operator Crane sebanyak 16 orang;
 - Operator Excavator sebanyak 16 orang;
 - Teknik Pendingin sebanyak 16 orang;
 - Uji Tanpa Rusak sebanyak 16 orang.

2. Peningkatan Pelayanan Antar Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di era milinium 4.0 akan semakin kompleks, terlebih lagi dengan adanya pemanfaatan teknologi yang terhubung dengan internet untuk melakukan pekerjaan, maka perlu persiapan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat berdaya saing. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- a. Terbatasnya lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja terdaftar;
- b. Terbatasnya pemenuhan lowongan kerja yang tersedia yang disebabkan belum sesuai antara skill/kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pemberi kerja/perusahaan; dan
- c. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas fungsional pengantar kerja.

Sebagai upaya penanganan permasalahan di atas, pada tahun 2023 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- a. Pemanfaatan aplikasi layanan ketenagakerjaan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA), dengan konten berupa pendaftaran pencaker, pelaporan pencaker/lowongan kerja, dll.;
- b. Pembuatan AK-I Online dan Bursa Kerja Online;
- c. Pelayanan antar kerja dengan target penempatan sebanyak 1500 orang melalui mekanisme antar kerja local (AKL);
- d. Pelayanan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi perusahaan;
- e. Pelayanan pembinaan / motivasi bagi pencaker fresh graduate melalui kegiatan Wednesday Inspiring setiap bulannya pada minggu ke-1 dan minggu ke-3; dan
- f. Pembinaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan pencaker korban PHK melalui Kegiatan Perluasan Kerja;

3. Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang harmonis, selaras dan berkeadilan merupakan harapan dalam rangka mewujudkan kondusifitas ketenagakerjaan yang dapat menjamin kelangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain :

- a. Belum optimalnya pemenuhan syarat kerja (PP/PKB);
- b. Belum optimalnya pembentukan LKS Bipartit di perusahaan;
- c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga mediator hubungan industrial baik dari kuantitas maupun kualitas.

Sehubungan dengan tantangan/permasalahan di atas, maka Disnaker Kota Balikpapan pada tahun 2023 akan melaksanakan:

- a. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- b. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- c. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK
- d. Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja
- e. Pemasyarakatan Hubungan Industrial

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Balikpapan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(2)		(3)	(5)	(6)	(2)		(3)	(5)	(6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83.5%	7,490,236,425	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83.5%	7,490,236,425
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Nilai SAKIP OPD	65	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Nilai SAKIP OPD	65	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	3 Dok	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	3 Dok	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Dok	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Dok	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.77%	5,445,243,375	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.77%	5,445,243,375
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	26 Dok	5,445,243,375	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	26 Dok	5,445,243,375
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.15%	320,770,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.15%	320,770,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	31 orang, 2 jenis	34,850,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnaker	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	31 orang, 2 jenis	34,850,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	31 orang	285,920,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	31 orang	285,920,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.93%	871,944,750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.93%	871,944,750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	5,215,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	5,215,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	18 Jenis Dan 13Jenis	26,091,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	18 Jenis Dan 13Jenis	26,091,700

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5 jenis	23,282,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5 jenis	23,282,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jenis bahan logistik kantor	80 jenis	456,435,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jenis bahan logistik kantor	80 jenis	456,435,800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	44,846,250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	44,846,250
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	8,574,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	8,574,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	201 porsi	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	201 porsi	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	226 kali	307,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	226 kali	307,500,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.62%	311,508,800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.62%	311,508,800
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		150,008,800	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		150,008,800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Jenis	161,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Jenis	161,500,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.15%	208,380,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.15%	208,380,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah jenis surat menyurat	1 jenis	3,650,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah jenis surat menyurat	1 jenis	3,650,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 jenis	44,432,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 jenis	44,432,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 paket	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 paket	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	m3	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	m3	-
	Disnaker	Jumlah tenaga Non PNS	7 orang	160,298,000		Disnaker	Jumlah tenaga Non PNS	7 orang	160,298,000
	Disnaker	Jumlah Tenaga Profesional	3 orang	-		Disnaker	Jumlah Tenaga Profesional	3 orang	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.30%	332,389,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.30%	332,389,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	14 unit	234,877,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	14 unit	234,877,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	2 unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	2 unit	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jenis peralatan yang dipelihara	9 paket	97,512,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jenis peralatan yang dipelihara	9 paket	97,512,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	0.033	114,994,800	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	0.033	114,994,800
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnaker	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dok	114,994,800	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnaker	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dok	114,994,800
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis	-	-
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun	43 Perusahaan	114,994,800	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun	43 Perusahaan	114,994,800
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	15%	1,561,767,755	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	15%	1,561,767,755
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	30 LPK	1,458,292,755	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	30 LPK	1,458,292,755
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	20 Perusahaan	1,458,292,755	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	20 Perusahaan	1,458,292,755

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	1 kali	51,775,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	1 kali	51,775,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Disnaker	Jumlah LPK Swasta yang dibina	3.3%	51,775,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Disnaker	Jumlah LPK Swasta yang dibina	3.3%	51,775,000
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	1 Dok	51,700,000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	1 Dok	51,700,000
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil		51,700,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil		51,700,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	43 Perusahaan	372,182,900	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	43 Perusahaan	372,182,900
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23.5%	191,589,900	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23.5%	191,589,900
Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23.5%	94,000,000	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23.5%	94,000,000
	Disnaker		4.500 Pencaker			Disnaker		4.500 Pencaker	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapat sosialisasi bimbingan jabatan	6 SMK	51,339,900	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapat sosialisasi bimbingan jabatan	6 SMK	51,339,900
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 Unit	46,250,000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 Unit	46,250,000
Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	18 Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	18 Orang	-
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	5%	138,610,500	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	5%	138,610,500
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	jumlah aplikasi yang dipelihara	3 Aplikasi	62,600,000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	jumlah aplikasi yang dipelihara	3 Aplikasi	62,600,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Lowongan kerja yang terposting pada sosial media disnaker	725 Loker	-	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Lowongan kerja yang terposting pada sosial media disnaker	725 Loker	-
Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah JMF yang dilaksanakan	2 Kali	76,010,500	Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah JMF yang dilaksanakan	2 Kali	76,010,500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker		100%		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker		100%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker		100%		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker		100%	-
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Disnaker		100%	41,982,500	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Disnaker		100%	41,982,500
Penyediaan Layanan Terpadu pada CPMI	Disnaker	Persentase Jumlah Calon OMI yang terlayani		41,982,500	Penyediaan Layanan Terpadu pada CPMI	Disnaker	Persentase Jumlah Calon OMI yang terlayani		41,982,500
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	69%	460,818,120	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	69%	460,818,120

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80%	-	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80%	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	45 Dokumen	-	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	45 Dokumen	-
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah dokumen pencatatan perjanjian kerja	100 Dokumen	-	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah dokumen pencatatan perjanjian kerja	100 Dokumen	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	25 Dokumen	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	25 Dokumen	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	80%	460,818,120	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	80%	460,818,120
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 Kali	96,874,560	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 Kali	96,874,560
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	50 Layanan	89,996,500	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	50 Layanan	89,996,500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Disnaker	Jumlah dokumen keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh/federasi/konfederasi yang tercatat	3 dokumen	101,264,560	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Disnaker	Jumlah dokumen keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh/federasi/konfederasi yang tercatat	3 dokumen	101,264,560
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah pertemuan LKS Tripartit	4 kali pertemuan	172,682,500	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah pertemuan LKS Tripartit	4 kali pertemuan	172,682,500
		Jumlah pertemuan Dewan Pengupahan	6 kali pertemuan				Jumlah pertemuan Dewan Pengupahan	6 kali pertemuan	
		Jumlah pertemuan Tim Deteksi Dini	4 kali pertemuan				Jumlah pertemuan Tim Deteksi Dini	4 kali pertemuan	
				10,000,000,000					10,000,000,000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019	
1	Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional		
2	Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja		
3	Percepatan sertifikasi profesi		
4	Perluasan kesempatan kerja formal		
5	Penguatan wirausaha produktif		
6	Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif		
7	Penegakan hukum ketenagakerjaan		
8	Peningkatan perlindungan pekerja migran		
9	Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan, dan akuntabel		
B	Provinsi	Renstra Disnakertrans Prov. Kaltim Periode 2015-2019	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		
2	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja		
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		

Sesuai dengan hasil identifikasi kebijakan nasional, provinsi, maupun reviu terhadap rancangan awal RKPD, maka dirumuskan kebutuhan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Identifikasi pernyataan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Rasio Capaian	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, sesuai dengan pasar kerja	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif.	1.	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.	%	100	148.75	148.75
			2.	Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan.	%	60	136.67	228
2.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.	1.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	26	36.8	141.5
			2.	Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan.	%	40	0	0
3.	Mewujudkan perlindungan tenaga kerja, pengembangan kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).		%	50	69.5	139
Rata – Rata Capaian						94.6	131.45	

Berdasar hasil identifikasi di atas, maka tujuan Renja Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan kerja;
2. Meningkatkan penempatan pencari kerja terdaftar; dan
3. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).

Adapun sasaran Renja Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja;
2. Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan; dan
3. Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2023, meliputi 4 program prioritas yang termasuk ke dalam belanja publik sebagaimana berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas 3 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - ✓ Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - ✓ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - ✓ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri atas 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan diantaranya:
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - ✓ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan
 - ✓ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja; terdiri atas 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Kota Pelayanan Antar Kerja, Penyuluhan
 - ✓ Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
 - ✓ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - ✓ Perluasan Kesempatan Kerja
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - ✓ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - ✓ Job Fair / Bursa Kerja
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- d. Program Hubungan Industrial, terdiri atas 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
 - ✓ Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan;
 - ✓ Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan;
 - ✓ Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta Pengupahan.

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/Kota,
 - ✓ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
 - ✓ Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha federasi serikat pekerja / serikat buruh serta nonafiliasi
 - ✓ Pelaksanaan Operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas di atas, maka ditunjang dengan program/kegiatan yang merupakan belaja rutin sebagaimana berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, yaitu :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rincian program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 disebutkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(3)*	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 07 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Hasil perhitungan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat internal OPD terhadap pelayanan Sekretariat kepada Bidang-Bidang	Disnaker	83.5%	7,490,236,425		Penting	83.5%	8,474,636,807
2 07 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Disnaker	65	-	APBD Kota	Penting	65	17,996,314
2 07 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan antara lain Renstra dan Renja	Disnaker	3 Dok	-	APBD Kota	'Penting	3 Dok	8,998,157
2 07 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Pelaksanaan penyusunan dokumen evaluasi Renstra dan Renja	Disnaker	2 Dok	-	APBD Kota	'Penting	2 Dok	8,998,157
2 07 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis layanan administrasi keuangan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Disnaker	83.77%	5,445,243,375	APBD Kota	Penting	83.77%	6,261,217,597
2 07 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai yang gaji dan tunjangan dalam setiap bulan	Disnaker	30 org/bln	5,445,243,375	APBD Kota	Penting	26 Dok	6,258,218,211
2 07 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Disnaker	1 Dok	-	APBD Kota	Penting	1 Dok	2,999,386

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	07	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian selama satu tahun	Disnaker	82.15%	320,770,000	APBD Kota	Penting	82.15%	368,549,461
2	07	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Penyediaan pakaian beserta atribut kelengkapannya seperti Pegawai PNS	Disnaker	31 Paket	34,850,000	APBD Kota	Penting	31 orang, 2 jenis	40,225,500
2	07	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Fasilitasi pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker	31 orang	285,920,000	APBD Kota	Penting	31 orang	328,323,961
2	07	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Disnaker	81.93%	871,944,750	APBD Kota	Penting	81.93%	948,142,618
2	07	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan seperti jenis komponen instalasi listrik (lampu, kabel dan lainnya)	Disnaker	1 Paket	5,215,000	APBD Kota	Penting	11 jenis	5,998,771
2	07	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan seperti AC, Komputer, Printer, Laptop, UPS ditambahkan dengan jenis peralatan dan perlengkapan yang lainnya	Disnaker	2 Paket	26,091,700	APBD Kota	Penting	18 Jenis Dan 13Jenis	29,993,857
2	07	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga seperti Kulkas, dispenser, teko listrik dan lainnya	Disnaker	5 paket	23,282,000	APBD Kota	Penting	5 jenis	41,991,399
2	07	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Penyediaan produk seperti ATK, makanan dan minuman rapat, penambah daya tahan tubuh	Disnaker	3 Paket	456,435,800	APBD Kota	Penting	80 jenis	362,029,500
2	07	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti cetak map, kertas kop, fotocopy cetak foto dan lain-lain	Disnaker	20 Paket	44,846,250	APBD Kota	Penting	20 jenis	42,112,651

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.07.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang seperti Koran dan majalah, kumpulan peraturan dan lain-lain yang sejenis	Disnaker	4 Dokumen	8,574,000	APBD Kota	Penting	4 jenis	9,857,546
2.07.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitas kunjungan tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu	Disnaker	201 porsi	-	APBD Kota	Penting	201 porsi	-
2.07.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Disnaker	226 laporan	307,500,000	APBD Kota	Penting	226 kali	456,158,894
2.07.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis layanan pengadaan BMD yang dilaksanakan dalam satu tahun	Disnaker	79.62%	311,508,800	APBD Kota	Penting	79.62%	256,658,228
2.07.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Disnaker	2 Unit	150,008,800				
2.07.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya seperti mesin pompa air, mesin fotocopy dan lain-lain	Disnaker	16 Unit	161,500,000	APBD Kota	Penting	16 Jenis	256,658,228
2.07.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Disnaker	83.15%	208,380,000	APBD Kota	Penting	83.15%	256,147,536
2.07.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat seperti jasa pengiriman dan pengadaan materai	Disnaker	1 Laporan	3,650,000	APBD Kota	Penting	1 jenis	4,199,140
2.07.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik seperti jasa berlangganan air bersih, jasa telekomunikasi, jasa berlangganan listrik, internet, jasa teleconference	Disnaker	6 Laporan	44,432,000	APBD Kota	Penting	6 jenis	41,991,399

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	07	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor seperti Sewa dekorasi/bunga	Disnaker	7 paket	-	APBD Kota	Penting	7 paket	-
2	07	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Penyediaan jasa kebersihan, jasa keamanan,serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor seperti sabun, tissue, alat pel dan lainnya	Disnaker	m3	-	APBD Kota	Penting	m3	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jasa tenaga bantuan (Non PNS Administrasi)	Disnaker	13 Laporan	160,298,000	APBD Kota	Penting	7 orang	209,956,997
						Jumlah Tenaga Profesional	Jasa Instruktur senam, Penceramah dan sejenisnya	Disnaker	3 orang	-	APBD Kota	Penting	3 orang	-
2	07	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis layanan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan dalam satu tahun	Disnaker	79.30%	332,389,500	APBD Kota	Penting	79.30%	365,925,053
2	07	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan seperti pembayaran pajak kendaraan tahunan dan lima tahunan, penyediaan BBM, perbaikan atau perawatan kendaraan	Disnaker	12 unit	234,877,500	APBD Kota	Penting	14 unit	269,944,711
2	07	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan seperti pembayaran pajak kendaraan tahunan dan lima tahunan, penyediaan BBM, perbaikan atau perawatan kendaraan	Disnaker	2 unit	-	APBD Kota	Penting	2 unit	-
2	7	1	2.09	7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Perawatan dan perbaikan peralatan dan mesin lainnya seperti service rutin mesin fotocopy, mesin absensi dan lainnya	Disnaker	16 Unit	97,512,000			9 paket	95,980,342

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	Disnaker	0.033	114,994,800	APBD Kota	Penting	0.033	115,000,000
2 .07 .02 .2.01 .01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	<u>Realisasi indikator – target indikator</u> x 100% Realisasi	Disnaker	1 Dok	114,994,800	APBD Kota	Penting	1 Dok	115,000,000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis		Disnaker		-				-
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		Disnaker	43 Perusahaan	114,994,800			43 Perusahaan	135,440,100
2 .07 .03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Disnaker	55%	1,561,767,755	APBD Kota	Penting	55%	1,257,334,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun } n} \times 100\%$	Disnaker	100%	1,458,292,755	APBD Kota	Penting	100%	1,137,807,000
2.07.03.2.01.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	Disnaker	111 Orang	1,458,292,755	APBD Kota	Penting	111 Orang	1,137,807,000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK Swasta yang terakreditasi}}{\text{Jumlah LPK Swasta yang terdaftar}} \times 100\%$	Disnaker	15 %	51,775,000	APBD Kota	Penting	15 %	59,763,600
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPK Swasta yang dibina	Jumlah LPK yang mendapatkan Sosialisasi Akreditasi	Disnaker	30 LPK	51,775,000	APBD Kota	Penting	30 LPK	59,763,600
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan kecil yang telah mendapatkan pembinaan produktivitas}} \times 100\%$	Disnaker	20 Perusahaan	51,700,000	APBD Kota	Penting	20 Perusahaan	59,763,600
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kpd Perusahaan Kecil	Disnaker	1 kali	51,700,000	APBD Kota	Penting	1 Kali	59,763,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang terserap x 100% Jumlah lowongan kerja yang tersedia	Disnaker	23.5%	372,182,900	APBD Kota	Penting	23.5%	572,219,539
2 .07 .04 .2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	Disnaker	23.5%	191,589,900	APBD Kota	Penting	23.5%	359,253,941
2 .07 .04 .2.01 .02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Pencaker terdaftar ditempatkan	Disnaker	4.500 Pencaker	94,000,000	APBD Kota	Penting	4.500 Pencaker	179,963,141
2 .07 .04 .2.01 .03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah SMK yang mendapatkan PBJ	Disnaker	480 Orang	51,339,900	APBD Kota	Penting	480 Orang	59,763,600
2 .07 .04 .2.01 .04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah disabilitas yang terlayani	Disnaker	1 Orang	46,250,000	APBD Kota	Penting	1 Orang	59,763,600
2 .07 .04 .2.01 .05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	Jumlah calon wirausaha baru	Disnaker	18 Orang	-	APBD Kota	Penting	18 Orang	59,763,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	Disnaker	5%	138,610,500	APBD Kota	Penting	5%	167,965,598
3.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi dipelihara (SINTA, SISKA, SIMPATI)	Disnaker	1 Dokumen	62,600,000	APBD Kota	Penting	1 Dokumen	71,985,256
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Lowongan kerja yang terposting pada sosial media disnaker	Jumlah Lowongan kerja yang terdaftar	Disnaker	725 Loker	-	APBD Kota	Penting	725 Loker	-
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan	Disnaker	2 Kali 500 Orang	76,010,500	APBD Kota	Penting	2 Kali 500 Orang	95,980,342
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	$\frac{\text{Jumlah PMI (Pra dan Purna) yang dilayani}}{\text{Jumlah PMI (Pra dan Purna) yang terdaftar}} \times 100\%$	Disnaker	100%	41,982,500	APBD Kota	Penting	100%	45,000,000
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Calon PMI / PMI Purna yang mendaftar yang dilatih	$\frac{\text{Jumlah calon PMI / PMI yang dilatih}}{\text{Jumlah calon PMI/PMI yang terdaftar}} \times 100\%$	Disnaker	0%	-	APBD Kota	Penting	100%	-
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah calon PMI yang dilayani}}{\text{Jumlah calon PMI yang terdaftar}} \times 100\%$	Disnaker	5 Orang	41,982,500	APBD Kota	Penting	1 Unit	45,000,000
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Presentase jumlah Purna PMI yang diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Purna PMI yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Purna PMI yang terdaftar}} \times 100\%$	Disnaker	-	-	APBD Kota	Penting	100%	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	.07	.05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan (yang ada di daerah)	Disnaker	69%	460,818,120	APBD Kota	Penting	69%	617,873,449
2	.07	.05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan		Disnaker	80%	-	APBD Kota	Penting	80%	47,990,171
2	.07	.05	2.01	.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	<u>Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan</u> x 100% jumlah perusahaan yang mengajukan Peraturan Perusahaan	Disnaker	45 Dokumen	-	45 Dokumen	Penting	45 Dokumen	-
2	.07	.05	2:03	.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah dokumen pencatatan perjanjian kerja	<u>Jumlah syarat kerja selain PP yang dicatatkan/ didaftarkan</u> x 100% Jumlah perusahaan yang mengajukan syarat kerja selain PP yang dicatatkan/ didaftarkan	Disnaker	100 Dokumen	-	100 Dokumen	Penting	100 Dokumen	17,996,314
2	.07	.05	2:03	.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker	25 Dokumen	-	25 Dokumen	Penting	25 Dokumen	29,993,857

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .05 2:02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelesaian perselisihan HI dengan perjanjian bersama atau anjuran	Disnaker	80%	460,818,120	APBD Kota		80%	569,883,278
2 .07 .05 2:02 .01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang telah diberikan sosialisasi pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	Disnaker	2 Kali	96,874,560	APBD Kota	Penting	2 Kali	119,975,427
2 .07 .05 2:02 .02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	<p><u>Jumlah penyelesaian perselisihan HI dengan Perjanjian Bersama x 100%</u> jumlah pencatatan perselisihan HI yang diajukan</p> <p><u>Jumlah penyelesaian perselisihan HI dengan Anjuran x 100%</u> jumlah pencatatan perselisihan HI yang diajukan</p>	Disnaker	50 Layanan	89,996,500	APBD Kota	Penting	50 Layanan	119,975,427
2 .07 .05 2:02 .03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah dokumen keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh/federasi/konfederasi yang tercatat	Jumlah sosialisasi serikat pekerja	Disnaker	3 dokumen	101,264,560	APBD Kota	Penting	3 dokumen	119,975,427

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
2	.07	.05	2:02	.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS Tripartit	Jumlah pertemuan Sidang Dewan Pengupahan	Disnaker	4 kali pertemuan	172,682,500	APBD Kota	Penting	4 kali pertemuan	209,956,997
						Jumlah pertemuan Dewan Pengupahan	Jumlah pertemuan Sidang LKS Tripartit	Disnaker	6 kali pertemuan			Penting	6 kali pertemuan	
						Jumlah pertemuan Tim Deteksi Dini		Disnaker	4 kali pertemuan				4 kali pertemuan	
							TOTAL PAGU			10,000,000,000				11,037,063,995

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha/perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mendukung prioritas Pemerintah Kota dengan Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kota.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (misalnya tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Sub Koordinator, Subbag, dan seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Dinas Ketenagakerjaan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, Juli 2022

Dinas Ketenagakerjaan

Kota Balikpapan



ANI MUFAIDAH